



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Propemperda), dimana hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa guna mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 153), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Memperhatikan : 1. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 tanggal 24 Oktober 2024;

2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 tanggal 31 Oktober 2024;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2025 sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Dengan keluarnya Keputusan ini diminta kepada OPD pemrakarsa melalui Bupati Lima Puluh Kota untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan Pembahasan Rancangan peraturan daerah dimaksud.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada Tanggal 31 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
KETUA,**



**Tembusan :**

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Bpk. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat di Padang

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

NOMOR : 15 Tahun 2024

TANGGAL : 31 Oktober 2024

PERIHAL : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2025

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai Penjelasan atau Keterangan	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Pemrakarsa	Ket.	
				Baru	Ubah							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
1	PERDA	Pedoman Tata Cara Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Bab III Pengakuan, Bab IV Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, Bab V Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bab VI Prosedur Tahapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Bab VII Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, Bab VIII Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, Bab IX Sistem Informasi, Bab X Peran Serta Masyarakat, Bab XI Pengawasan, Bab XII Penyelesaian Sengketa, Bab XIV Ketentuan Peralihan, Bab XV Ketentuan Penutup	V	Permenagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat	V	DILH Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bappelitbangda, DPM/D/N, Bagian Perekonomian	Maret 2025	DPRD			
2	PERDA	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota 2025-2029	RPJMD 2025-2029	V	Permenagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Bagian Keempat tata Cara Penyusunan RPJMD Paragraf 1 Perjalanan Penyusunan RPJMD Pasal 41)	V	Tim Penyusunan RPJMD	Juni 2025	Bappelitbangda			

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Disertai NA Penjelasan atau Keterangan	Unit/ Instansi Terkait	Target (8)	Penyampaian (9)	Pemrakarsa (10)	Ket. (11)
				Baru	Ubah							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3	PERDA	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	Pembentukan, Susunan dan Tipologi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	V	Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.	V	Seluruh Perangkat Daerah	November 2025	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah			
4	PERDA	Pelestarian Adat Minangkabau di Nagari-Negari	Pelestarian adat minangkabau dan pemajuan kebudayaan yang memuat pokok-pokok pikiran kebudayaan serta tata cara perlindungan dan pemeliharaannya oleh pemerintah	V	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	November 2025	DPRD				
5	PERDA	Perlindungan Lahan Pertanian Pangand Berkelanjutan	Perlindungan Lahan Pertanian Pangand Berkelanjutan	V	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengukuran Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau	V						
6	PERDA	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Upaya Pemenuhan Hak Anak yang Tertiwang di dalam 5 Klauster yakni, Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Permanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya, serta Perlindungan Khusus yang terdiri dari Pengawatan Kebenongan, Kabupaten Anak (KLA), Penyelenggaraan KLA di Kecamatan dan Penyelenggaraan KLA di Nagari	V	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Berkelanjutan	Dinas Tanaman Pangand, Holtikultura dan Perkebunan	November 2025	DPRD				
					Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan	V						
					Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan	V						
					Bapelitbangda, Disdukcapil, Disdikbud, Dinkes, Dinsos, Dispusip, Kesbangpol, Dispora, Disuhub, Kemenag, Polres 50 Kota Polres Kota Payakumbuh, LPKA, BAPP, BPS, BKAD, BPBD, Diskominfot, DPMDN, Damkar, PU, Dinaskertana, Satpol PP, Bag, Hukum, UPPTD PPA, DLHPP, PDAM, LKAAM, PKK, Camat se Kabupaten, Forum Anak Daerah	Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan	November 2025					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status	Disertai Perjelasan	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Penrakarsa	Ket.
				Baru					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PERDA	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045	V	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Bapelitbang dan semua OPD di Kabupaten Lima Puluh Kota	Februari 2025	Bapelitbangda	Proses Evaluasi
2	PERDA	Kawasan Tanpa Rokok	Pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok serta dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan	V	UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Kesehatan dan PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Penunda, dan Olaharaga, badan Kesbangpol, Dinas Sosial, BNN, dan Polres	Februari 2025	Dinas Kesehatan	
3	PERDA	Penyelenggaraan UU Pergawai Kesehatan Jiwa	Upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu keluarga dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat	V	UU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, RSUD dr. Ahmad Darwis, Polres, Kodim, BPJS, bagian Kesra, Bappelitbangda	April 2025	Dinas Kesehatan	
4	PERDA	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permekiman Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota	Sebagai dasar penanganan kekumuhan serta penganggaran dalam penanganan kumuh yang memuat kriteria kekumuhan, tata cara identifikasi, penilaian, penetapan lokasi, pencegahan kumuh serta peningkatan kualitas pemukiman kumuh	V	'UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang	Dinas LH Perumahan dan Kawasan Permekiman, Bappelitbangda, Bagian Hukum Seidia	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permekiman		

#### RANPERDA LUNCURAN PROTEMERDA TAHUN 2024

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	NA	Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Pemrakarsa	Ket.
				Baru	Ubah			Penjelasan atau Keterangan	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
5	PERDA	Pelestarian Adat dan Pemajuan Kebudayaan	Pelestarian adat minangkabau yang memuat pokok-pokok pikiran kebudayaan serta tata cara perlindungan dan pemeliharaannya oleh pemerintah	v	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengiatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau	v	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	Mei 2024	DPRD				
6	PERDA	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Pedoman bagi Perda dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman	v	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	v	BAPELITBANGDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU/PUPR	Okttober 2025	BAPELITBANG				
7	PERDA	Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan pemuda Pemberian penghargaan	v	Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan	v	Disparpora, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	November 2025	DPRD				
8	PERDA	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tertib Bangunan, Pedagang Kaki Lima, Usaha Partisipasi, Kesehatan, Sosial, ASN dan Anak Sekolah, Minuman Beralkohol, Inhalan, Bulan Ramadhan, Tempat hiburan, Iklan dan Reklame, Rumah Kosy/ Sewaan, Izin Usaha, Keramaian, Penertiban terhadap Pelanggaran atas Kegiatan yang Perihalannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah, Penyebaran Blaya Paksaan Pengakarn/ Pelaksanaan Perda dan Pengenaan Sanksi Denda Administratif	v	PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perihalungan Masyarakat	v	DPM PTSP, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PU/PUR, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan	November 2025	DPRD				
9	PERDA	Fasilitasi Penyelemparaan Pesantren	Jenis Pendidikan Keagamaan Keteriban Masyarakat Bentuk-bentuk fasilitasi Penghargaan	v	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama	v	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bagian Kesta Sekretariat Daerah	November 2025	DPRD				

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Disertai NA	Unit/ Instansi	Target (9)	Penyampaian	Pemrakarsa	Ket. (11)
				Baru	Ubah						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
5	PERDA	Pelestarian Adat dan Pernajuan Kebudayaan	Pelestarian adat minangkabau dan pemajuan kebudayaan yang memuat pokok-pokok pikiran kebudayaan serta tata cara perlindungan dan pemeliharaannya oleh pemerintah	V	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pernajuan Kebudayaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau	V	Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga	Mei 2025	DPRD		
6	PERDA	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)	Pedoman bagi Pemda dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perumahan dan permukiman	V	UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	V	BAPELITBANGDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU/PUPR	Okttober 2025	BAPELITBANG		
7	PERDA	Pemberdayaan Pemuda	Pemberdayaan pemuda Pemberian penghargaan Organisasi pemuda di daerah	V	Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan	V	Disparpora, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan	November 2025	DPRD		
8	PERDA	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Terib Bangunan, Pedagang Kaki Lima, Usaha Pariwisata, Kesehatan, Sosial, ASN dan Anak Sekolah, Minuman Beralkohol, Inhalan, Bulan Ramadhan, Tempat hiburan, Iklan dan Reklame, Rumah Kost/ Sewaan, Izin Usaha, Keramaian, Peneritian atas terhadap Pelanggaran atas Kegiatan yang Perzinannya Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah, Pembebaran Biaya Paksaan Peningakan/ Pelaksanaan Perda dan Pengenaan Sanksi Denda Administratif	V	PP Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permandirgi Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat	V	DPM PTSP, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas PU/PUR, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan	November 2025	DPRD		
9	PERDA	Fasilitasi Penyeleenggaraan Pesantren	Jenis Pendidikan Keagamaan Keteriban Masyarakat Bentuk bentuk fasilitasi Penghargaan	V	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan	V	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Bagian Kesra Sekretariat Daerah	November 2025	DPRD		

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Disertai Baru Ubah	Pelaksanaan NA	Unit/ Instansi Terkait	Target Penyampaian	Pernakarsa	Ket.
					Penjelasan atau Keterangan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
<b>ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH</b>											
1	PERDA	Pertanggungjawaban Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK	V	PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	V	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Setda, Bappelitbangda	Juni 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
2	PERDA	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025	V	PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	V	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Setda	September 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		
3	PERDA	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	APBD Athun Anggaran 2026	V	PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	V	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Setda	Oktober 2025	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah		

